



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor publik atau sektor pemerintahan memiliki perangkat kerja daerah yang bertindak sebagai sarana dalam pelaksanaan fungsi, tujuan dan aktivitas sektor publik agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, satuan kerja ini disebut dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). SKPD mempunyai tugas pokok melaksanakan/mengkoordinasikan kewenangan pemerintah yang telah dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti penyusunan program kerja dan kegiatan, pelayanan dan ketertiban umum, serta administrasi dan keuangan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

SKPD Provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. SKPD Kabupaten/Kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Saat ini SKPD di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 55 unit SKPD yang terdiri dari 35 Dinas/Intansi dan 20 Kecamatan. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, SKPD berperan sebagai pengguna anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran yang digunakan untuk menjalankan program kerja SKPD akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

dalam BAB XI Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintahan ditujukan untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan APBN/APBD. Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintahan meningkat seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Pemerintah diatur untuk memberikan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintahan yang bisa diakses melalui internet sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pemerintah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Menurut Mardiasmo (2009), publik memiliki hak-hak dasar terhadap pemerintah yaitu : a. hak untuk tahu (*Right To Know*); b. Hak untuk diberi informasi (*Right To Be Informed*); c. Hak untuk didengar aspirasinya (*Right To Be Heard To Be Listened To*). Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Mengingat pentingnya peran laporan keuangan bagi suatu instansi, maka dibutuhkan informasi yang andal dan berkualitas sehingga mudah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat dipahami. Pemerintah diharapkan mampu memenuhi transparansi dan akuntabilitasnya dengan memenuhi kriteria karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti yang telah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Jika pemerintah belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka akan ada potensi-potensi kerugian negara, kecurangan (*fraud*), kesalahsajian material (*error*), ketidakefisienan serta ketidakefektifan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2019, dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 443 laporan keuangan (82%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 laporan keuangan (16%) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 13 laporan keuangan (2%). Fenomena ini, menandakan masih ada 18% atau sebanyak 109 laporan keuangan pada instansi pemerintah yang belum menerapkan standar-standar pelaporan akuntansi dan memenuhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah diseluruh indonesia belum memenuhi 100% Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama selama 5



tahun, mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) tahun 2019

Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016	Opini Tahun 2017	Opini Tahun 2018
Kabupaten Indragiri Hilir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : <https://www.bpk.go.id> (IHPS I Tahun 2019)

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014-2015 dapat mengartikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat kelemahan dan belum mampu untuk memenuhi karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mendapat predikat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun hal tersebut belum menutupi kemungkinan masih terdapat kendala dalam pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mengingat terjadinya beberapa kali perubahan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta perubahan yang terjadi pada Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan pada Peraturan Bupati tersebut menandakan peraturan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu disempurnakan.

Perubahan pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tentu akan menimbulkan adanya peraturan baru. Peraturan baru tersebut memerlukan adaptasi dari sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai pengelola Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adaptasi dapat berupa pemberian pelatihan, seminar dan sosialisasi terhadap peraturan baru yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena salah satu faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah pemahaman akuntansi pemerintahan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah aparatur/staff yang mengelola laporan keuangan pemerintahan.

Selain sumber daya manusia, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu teknologi informasi. Lajunya perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat mendukung terlaksananya pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan penerapan aplikasi yang ditujukan sebagai media *database* informasi dalam instansi pemerintahan yang bersangkutan diharapkan akan membantu pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah, perumusan kebijakan daerah, dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dengan diterapkannya aplikasi ini pengelolaan laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah lebih akurat dan berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, pemerintah membentuk badan pengawas yang ditugaskan untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan. Dengan terlaksananya sistem pengendalian intern yang ketat dan memadai dalam upaya penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pemerintah diharapkan dapat menyajikan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang benar dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti pada penelitian Surastiani (2015), dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Hasil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Tampaty, et al (2016), dalam *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pada penelitian Yeny et al (2016), dengan judul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan komitmen pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diamati bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dimana hipotesa dari masing-masing objek tidak menunjukkan hasil yang tetap. Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Alasan peneliti memilih ketiga variabel tersebut karena sumber daya manusia merupakan aspek utama untuk menunjang suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah menghasilkan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi diangkat menjadi salah satu variabel karena kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan cepat.

Apabila perkembangan teknologi mampu dimanfaatkan dengan baik akan sangat membantu dalam proses penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan akurat. Sistem pengendalian intern diangkat menjadi variabel karena pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam pengawasan kinerja pemerintah agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah upaya penerapan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Surastiani (2015), adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian. Dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Salatiga pada tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah karena belum diketahuinya faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada SKPD Di Kabupaten Indragiri Hilir)”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Apakah sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Untuk mengetahui dan menguji apakah sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas sehingga tercapai laporan keuangan yang andal, dapat dibandingkan, relevan dan mudah dipahami sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

karakteristik kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

b. Teknologi informasi

Dengan adanya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dengan baik akan mempermudah proses pengelolaan laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mampu meningkatkan kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pengawas yang melakukan penilaian secara independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang diberikan.

d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai sarana penyedia informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas publik yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas tersebut untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan sebagai referensi dan bahan untuk evaluasi guna meningkatkan kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

- c. Untuk akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga menambah referensi kepustakaan untuk penelitian akuntansi sektor publik.

- d. Untuk peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi pihak-pihak berkepentingan sebagai acuan bahan teori dan referensi yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah penelitian.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan juga dipaparkan dalam bab ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini, tinjauan dari penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai acuan dari penelitian ini. Dalam bab ini juga memaparkan kerangka pemikiran yang menjelaskan tujuan penelitian dalam bentuk skema, serta pengembangan hipotesis yang merupakan dugaan sementara terhadap jawaban masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian, prosedur pengumpulan data, operasional variabel yang mendeskripsikan lebih dalam mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesa dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi deskripsi hasil dari pengujian hipotesa dan pembahasan masalah mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.



BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari penelitian yang merangkum secara menyeluruh mengenai penelitian ini setelah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga berisikan keterbatasan penelitian, saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pihak-pihak berkepentingan untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.